

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai sebuah negara agraris mempunyai tanah yang luas dan subur untuk menanam dan memenuhi swasembada pangan secara nasional. Terlebih lagi, Indonesia mempunyai sarana dan prasarana lengkap untuk mendukung swasembada pangan yang dapat diandalkan. Dengan memperhitungkan lahan pertanian yang luas dan potensial, jumlah sumber daya manusia di Indonesia yang banyak, pupuk dan benih yang memadai dan juga saluran irigasi yang sudah ada sejak dulu untuk mengairi lahan pertanian tersebut.

Pada saat ini, dengan berkembang pesatnya pertumbuhan penduduk dan kebutuhan akan pangan sangatlah tinggi, sehingga terjadi kelangkaan dan harga bahan baku pangan (beras) menjadi tinggi. Indonesia adalah negara pemakan beras nomor 4 terbesar di dunia. Konsumsi beras penduduk Indonesia mencapai 139kg/kapita setiap tahun. Pada dasarnya, beras merupakan makanan pokok orang Indonesia, yang saat ini jumlahnya sangat besar sehingga permintaan akan beras juga sangat tinggi yang menyebabkan kelangkaan.

Kelangkaan beras yang terjadi di Indonesia juga disebabkan oleh langkanya lahan-lahan subur di Indonesia dan mahalnya harga pupuk. Selain itu pula, pemerintah masih hanya mengandalkan pulau jawa saja sebagai pemasok kebutuhan pangan terutama beras secara nasional. Disisi lain, luas lahan pertanian tidak banyak bertambah sejak 1980 dan jumlah petani mengalami penurunan. Jika kedua hal ini berarti penurunan produksi beras nasional, maka ada potensi masalah ketahanan pangan yang dapat terjadi. Oleh karena itu Pemerintah

mengambil kebijakan dengan mengimpor beras untuk memenuhi kebutuhan secara nasional. Aktivitas impor terjadi ketika permintaan atas barang / jasa tidak dapat dipenuhi di dalam negeri. Maka, Dengan adanya impor bahan baku pangan (beras) bertujuan untuk memenuhi kebutuhan secara nasional.

Pengertian Impor menurut Ahsjar, “Impor adalah memasukkan barang dari luar negeri ke dalam wilayah Pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Sedangkan menurut Undang – Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan Pasal 1 disebutkan “Impor adalah kegiatan memasukan barang ke dalam Daerah Pabean”.¹

Pemerintah akan memperoleh pemasukan hanya apabila mengenakan tarif impor / pajak terhadap beras yang diimpor. Biaya atas bahan baku pangan impor tersebut dikenakan pada saat barang tersebut masuk kedalam pabean yang dikenakan atas pajak. Bea masuk itulah yang menjadi sumber pendapatan negara. Dampak yang diterima bangsa Indonesia adalah pengeluaran devisa negara yang cukup besar untuk melaksanakan impor. Hal ini berarti bangsa Indonesia telah memberikan penghidupan bagi petani negara lain, sedangkan bagi petani dalam negeri tidak. Suatu hal yang ironis bagi sebuah negara agraris yang luas dan kaya seperti Indonesia. Negara ini merupakan negara penghasil beras, akan tetapi melakukan impor beras dalam jumlah yang tidak sedikit.

Dengan adanya impor bahan baku pangan dapat berakibat pada terpuruknya pendapatan petani domestik yang rendah menjadi sangat rendah dan juga menurunkan motivasi petani untuk bercocok tanam karena hasilnya akan bersaing

¹ H. Djauhari Ahsjar, *Pedoman transaksi ekspor dan impor* (Jakarta: Prestasi Pustaka) p153

dengan produk impor. Ketika harga pokok dari impor beras ini meroket, akan berakibat pula pada penurunan produktivitas dan secara langsung akan memengaruhi pendapatan para pengrajin dari bahan baku tersebut.

Namun, pada saat ini pemerintah mengambil kebijakan untuk membebaskan bea masuk atas bahan baku pangan. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.011/2010 tentang Pembebasan Bea Masuk Impor serta PMK Nomor 13/PMK.011/2011 tentang Perubahan 57 Pos Tarif Bahan Pangan. Akibat dari pembebasan bea masuk itulah, negara tidak mendapat pendapatan dan petani merugi.

Menurut Surono, Berbagai kebijakan dalam usaha tani padi yang telah ditempuh pemerintah pada dasarnya kurang berpihak pada kepentingan petani. Hal ini terlihat dari:

- (1) Kebijakan tarif impor beras yang rendah, sehingga mendorong membanjirnya beras impor yang melebihi kebutuhan di dalam negeri;
- (2) Pembukaan lahan-lahan baru;
- (3) Pemerintah masih menggunakan indikator inflasi untuk mengendalikan harga pangan, dengan menekan harga beras di tingkat perdagangan besar; dan
- (4) Teknologi pasca panen di tingkat petani sudah jauh tertinggal, sehingga tingkat rendemen dan kualitas beras yang dihasilkan terus menurun.²

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penulis bermaksud mengangkatnya ke dalam sebuah karya ilmiah dengan judul **“Analisis Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Bahan Baku Pangan (Beras)”**

² Surono, Sulastri. *Perkembangan produksi dan Kebutuhan Impor Beras serta Kebijakan Pemerintah untuk Melindungi Petani* (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia,2001)

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penulisan karya ilmiah ini adalah:

1. Apakah dampak dari Pembebasan bea masuk atas impor bahan baku pangan (beras) terhadap penerimaan bea masuk?
2. Mengapa diberlakukan pembebasan bea masuk atas impor bahan baku pangan (beras) ?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini antara lain:

- a. Memberikan gambaran dengan jelas dari permasalahan dan fakta yang terjadi atas pembebasan bea masuk atas impor bahan baku pangan (beras).
- b. Mendapatkan data yang diperlukan dalam rangka penulisan karya ilmiah yang disusun untuk memenuhi persyaratan studi dalam meraih gelar ahli madya pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta

2. Manfaat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, antara lain :

a. Bagi Perusahaan / Instansi

- 1) Sebagai sumbangan informasi yang dapat dipakai sebagai penambah wawasan kepada publik mengenai pembebasan bea

masuk atas bahan baku pangan baik dari sudut pandang pemerintah maupun masyarakat.

- 2) Sebagai sarana untuk menjalin hubungan kerja sama dengan lembaga pendidikan yang bersangkutan.

b. Bagi Mahasiswa

- 1) Memberikan pengetahuan mengenai pembebasan bea masuk atas impor bahan baku pangan (beras) baik secara teoritis maupun secara praktis.
- 2) Memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Diploma Tiga (D3) di Universitas Negeri Jakarta.

c. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta

Sebagai media untuk menjalin hubungan kerja sama dengan perusahaan / instansi yang dituju.

d. Bagi penulis selanjutnya

Sebagai tambahan informasi dan masukan untuk membantu memberikan gambaran yang lebih jelas bagi para penulis yang ingin melakukan penelitian mengenai pembebasan bea masuk atas bahan baku pangan (beras).